



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 107 TAHUN  
2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 655);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 107), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 9 diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di rekening kas umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa;

- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Dihapus.
  - (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
  - (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
  - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
  - (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
3. Ketentuan ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*;
- (5a) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

- (5b) Ketentuan mengenai format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

5. Ketentuan ayat (6) Pasal 15 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6a), ayat (6b), dan ayat (6c), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah;
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah belum disalurkan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah tahun anggaran berjalan;
- (6a) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- (6b) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan;
- (6c) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), sisa Dana Desa

tahap II yang belum disalurkan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada rekening kas umum Negara.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 2 Februari 2018

✓ BUPATI SUMBAWA, 

“ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA  
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN  
ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN ANGGARAN 2018

| NO. | KECAMATAN  | DESA          | PAGU DANA DESA 2018<br>(Rp.) | KETERANGAN |
|-----|------------|---------------|------------------------------|------------|
| (1) | (2)        | (3)           | (4)                          | (5)        |
| 1   | Lunyuk     | Lunyuk Rea    | 985.665.000,00               |            |
| 2   | Lunyuk     | Lunyuk Ode    | 699.333.000,00               |            |
| 3   | Lunyuk     | Jamu          | 795.365.000,00               |            |
| 4   | Lunyuk     | Padasuka      | 867.388.000,00               |            |
| 5   | Lunyuk     | Sukamaju      | 743.121.000,00               |            |
| 6   | Lunyuk     | Perung        | 819.622.000,00               |            |
| 7   | Lunyuk     | Emang Lestari | 832.565.000,00               |            |
| 8   | Alas       | Luar          | 740.374.000,00               |            |
| 9   | Alas       | Baru          | 835.653.000,00               |            |
| 10  | Alas       | Kalimango     | 776.320.000,00               |            |
| 11  | Alas       | Marente       | 832.428.000,00               |            |
| 12  | Alas       | Juranalas     | 852.528.000,00               |            |
| 13  | Alas       | Dalam         | 961.793.000,00               |            |
| 14  | Alas       | Pulau Bungin  | 984.549.000,00               |            |
| 15  | Alas       | Labuhan Alas  | 771.864.000,00               |            |
| 16  | Utan       | Stowe Brang   | 822.852.000,00               |            |
| 17  | Utan       | Labuhan Bajo  | 907.452.000,00               |            |
| 18  | Utan       | Pukat         | 954.558.000,00               |            |
| 19  | Utan       | Orong Bawa    | 689.183.000,00               |            |
| 20  | Utan       | Jorok         | 999.810.000,00               |            |
| 21  | Utan       | Motong        | 827.003.000,00               |            |
| 22  | Utan       | Tengah        | 767.417.000,00               |            |
| 23  | Utan       | Sabedo        | 768.309.000,00               |            |
| 24  | Utan       | Bale Brang    | 743.696.000,00               |            |
| 25  | Batulanteh | Baturotok     | 1.383.420.000,00             |            |
| 26  | Batulanteh | Tangkampulit  | 1.144.456.000,00             |            |
| 27  | Batulanteh | Baodesa       | 1.154.466.000,00             |            |
| 28  | Batulanteh | Tepal         | 1.215.414.000,00             |            |
| 29  | Batulanteh | Batudulang    | 760.360.000,00               |            |
| 30  | Batulanteh | Kelungkung    | 733.664.000,00               |            |
| 31  | Moyo Hilir | Moyo          | 700.582.000,00               |            |
| 32  | Moyo Hilir | Kakiang       | 781.411.000,00               |            |
| 33  | Moyo Hilir | Ngeru         | 711.336.000,00               |            |
| 34  | Moyo Hilir | Berare        | 731.644.000,00               |            |
| 35  | Moyo Hilir | Poto          | 694.190.000,00               |            |
| 36  | Moyo Hilir | Serading      | 805.644.000,00               |            |
| 37  | Moyo Hilir | Olat Rawa     | 778.637.000,00               |            |
| 38  | Moyo Hilir | Batu Bangka   | 771.970.000,00               |            |

uK



| (1) | (2)        | (3)           | (4)              | (5) |
|-----|------------|---------------|------------------|-----|
| 39  | Moyo Hilir | Moyo Mekar    | 678.853.000,00   |     |
| 40  | Moyo Hilir | Labuhan Ijuk  | 717.502.000,00   |     |
| 41  | Moyo Hulu  | Sempe         | 745.118.000,00   |     |
| 42  | Moyo Hulu  | Semamung      | 680.776.000,00   |     |
| 43  | Moyo Hulu  | Sebasang      | 699.473.000,00   |     |
| 44  | Moyo Hulu  | Batu Tering   | 696.303.000,00   |     |
| 45  | Moyo Hulu  | Batu Bulan    | 732.814.000,00   |     |
| 46  | Moyo Hulu  | Mokong        | 746.743.000,00   |     |
| 47  | Moyo Hulu  | Pernek        | 762.336.000,00   |     |
| 48  | Moyo Hulu  | Leseng        | 818.043.000,00   |     |
| 49  | Moyo Hulu  | Lito          | 723.547.000,00   |     |
| 50  | Moyo Hulu  | Marga Karya   | 698.401.000,00   |     |
| 51  | Moyo Hulu  | Maman         | 751.163.000,00   |     |
| 52  | Moyo Hulu  | Berang Rea    | 747.286.000,00   |     |
| 53  | Ropang     | Lebin         | 718.103.000,00   |     |
| 54  | Ropang     | Lebangkar     | 742.782.000,00   |     |
| 55  | Ropang     | Ropang        | 726.619.000,00   |     |
| 56  | Ropang     | Lawin         | 808.101.000,00   |     |
| 57  | Ropang     | Ranan         | 709.047.000,00   |     |
| 58  | Lape       | Lape          | 919.314.000,00   |     |
| 59  | Lape       | Labuhan Kuris | 943.471.000,00   |     |
| 60  | Lape       | Dete          | 804.374.000,00   |     |
| 61  | Lape       | Hijrah        | 777.004.000,00   |     |
| 62  | Plampang   | Muer          | 745.319.000,00   |     |
| 63  | Plampang   | Plampang      | 764.276.000,00   |     |
| 64  | Plampang   | Teluk Santong | 734.868.000,00   |     |
| 65  | Plampang   | Sepayung      | 869.823.000,00   |     |
| 66  | Plampang   | Sepakat       | 726.904.000,00   |     |
| 67  | Plampang   | Prode I       | 752.876.000,00   |     |
| 68  | Plampang   | Prode II      | 952.306.000,00   |     |
| 69  | Plampang   | Prode III     | 741.691.000,00   |     |
| 70  | Plampang   | Selante       | 712.603.000,00   |     |
| 71  | Plampang   | Brang Kolong  | 747.359.000,00   |     |
| 72  | Plampang   | Usar          | 1.014.003.000,00 |     |
| 73  | Empang     | Boal          | 748.088.000,00   |     |
| 74  | Empang     | Jotang        | 729.556.000,00   |     |
| 75  | Empang     | Empang Atas   | 797.044.000,00   |     |
| 76  | Empang     | Empang Bawa   | 721.744.000,00   |     |
| 77  | Empang     | Ongko         | 738.895.000,00   |     |
| 78  | Empang     | Lamenta       | 716.147.000,00   |     |
| 79  | Empang     | Gapit         | 745.957.000,00   |     |
| 80  | Empang     | Pamanto       | 695.428.000,00   |     |
| 81  | Empang     | Bunga Eja     | 681.886.000,00   |     |
| 82  | Empang     | Jotang Beru   | 725.340.000,00   |     |
| 83  | Alas Barat | Mapin Rea     | 739.743.000,00   |     |
| 84  | Alas Barat | Mapin Kebak   | 719.445.000,00   |     |
| 85  | Alas Barat | Labuhan Mapin | 745.529.000,00   |     |
| 86  | Alas Barat | Lekong        | 759.407.000,00   |     |
| 87  | Alas Barat | Gontar        | 732.761.000,00   |     |
| 88  | Alas Barat | Usar Mapin    | 772.499.000,00   |     |
| 89  | Alas Barat | Gontar Baru   | 786.820.000,00   |     |

| (1) | (2)           | (3)             | (4)              | (5) |
|-----|---------------|-----------------|------------------|-----|
| 90  | Alas Barat    | Mapin Beru      | 744.391.000,00   |     |
| 91  | Labuhan Badas | Labuhan Badas   | 764.593.000,00   |     |
| 92  | Labuhan Badas | Karang Dima     | 836.316.000,00   |     |
| 93  | Labuhan Badas | Labuhan Sumbawa | 1.274.319.000,00 |     |
| 94  | Labuhan Badas | Labuhan Aji     | 1.193.572.000,00 |     |
| 95  | Labuhan Badas | Sebotok         | 791.130.000,00   |     |
| 96  | Labuhan Badas | Bajo Medang     | 752.977.000,00   |     |
| 97  | Labuhan Badas | Bugis Medang    | 730.283.000,00   |     |
| 98  | Labangka      | Labangka        | 768.849.000,00   |     |
| 99  | Labangka      | Sekokat         | 781.998.000,00   |     |
| 100 | Labangka      | Suka Mulya      | 740.751.000,00   |     |
| 101 | Labangka      | Suka Damai      | 967.229.000,00   |     |
| 102 | Labangka      | Jaya Makmur     | 779.781.000,00   |     |
| 103 | Buer          | Tarusa          | 799.454.000,00   |     |
| 104 | Buer          | Jurumapin       | 756.238.000,00   |     |
| 105 | Buer          | Kalabeso        | 702.525.000,00   |     |
| 106 | Buer          | Labuhan Burung  | 813.344.000,00   |     |
| 107 | Buer          | Pulau Kaung     | 743.262.000,00   |     |
| 108 | Buer          | Buin Baru       | 801.863.000,00   |     |
| 109 | Rhee          | Rhee            | 763.016.000,00   |     |
| 110 | Rhee          | Sampe           | 714.016.000,00   |     |
| 111 | Rhee          | Luk             | 721.918.000,00   |     |
| 112 | Rhee          | Rhee Loka       | 995.476.000,00   |     |
| 113 | Unter Iwes    | Pelat           | 880.492.000,00   |     |
| 114 | Unter Iwes    | Kerekeh         | 743.663.000,00   |     |
| 115 | Unter Iwes    | Boak            | 710.252.000,00   |     |
| 116 | Unter Iwes    | Jorok           | 672.007.000,00   |     |
| 117 | Unter Iwes    | Kerato          | 705.357.000,00   |     |
| 118 | Unter Iwes    | Pungka          | 662.931.000,00   |     |
| 119 | Unter Iwes    | Uma Beringin    | 698.557.000,00   |     |
| 120 | Unter Iwes    | Nijang          | 698.935.000,00   |     |
| 121 | Moyo Utara    | Pungkit         | 754.955.000,00   |     |
| 122 | Moyo Utara    | Sebewe          | 727.330.000,00   |     |
| 123 | Moyo Utara    | Penyaring       | 861.923.000,00   |     |
| 124 | Moyo Utara    | Kukin           | 829.942.000,00   |     |
| 125 | Moyo Utara    | Baru Tahan      | 724.608.000,00   |     |
| 126 | Moyo Utara    | Songkar         | 734.045.000,00   |     |
| 127 | Maronge       | Simu            | 757.427.000,00   |     |
| 128 | Maronge       | Maronge         | 766.137.000,00   |     |
| 129 | Maronge       | Pemasar         | 728.359.000,00   |     |
| 130 | Maronge       | Labuhan Sangoro | 758.432.000,00   |     |
| 131 | Tarano        | Bantulante      | 739.757.000,00   |     |
| 132 | Tarano        | Labuhan Bontong | 744.550.000,00   |     |
| 133 | Tarano        | Labuhan Aji     | 766.888.000,00   |     |
| 134 | Tarano        | Labuhan Jambu   | 786.844.000,00   |     |
| 135 | Tarano        | Mata            | 821.079.000,00   |     |
| 136 | Tarano        | Tolo 'Oi        | 750.820.000,00   |     |
| 137 | Tarano        | Banda           | 729.713.000,00   |     |
| 138 | Tarano        | Labuhan Pidang  | 866.753.000,00   |     |
| 139 | Lopok         | Pungkit         | 743.985.000,00   |     |
| 140 | Lopok         | Berora          | 740.039.000,00   |     |

| (1)                     | (2)        | (3)        | (4)                | (5) |
|-------------------------|------------|------------|--------------------|-----|
| 141                     | Lopok      | Lopok      | 714.618.000,00     |     |
| 142                     | Lopok      | Langam     | 785.395.000,00     |     |
| 143                     | Lopok      | Mama       | 768.635.000,00     |     |
| 144                     | Lopok      | Lopok Beru | 744.517.000,00     |     |
| 145                     | Lopok      | Tatede     | 716.278.000,00     |     |
| 146                     | Lenangguar | Tatebal    | 721.433.000,00     |     |
| 147                     | Lenangguar | Lenangguar | 811.709.000,00     |     |
| 148                     | Lenangguar | Ledang     | 886.409.000,00     |     |
| 149                     | Lenangguar | Telaga     | 775.382.000,00     |     |
| 150                     | Orong Telu | Senawang   | 773.951.000,00     |     |
| 151                     | Orong Telu | Kelawis    | 731.405.000,00     |     |
| 152                     | Orong Telu | Mungkin    | 777.905.000,00     |     |
| 153                     | Orong Telu | Sebeok     | 766.473.000,00     |     |
| 154                     | Lantung    | Lantung    | 703.150.000,00     |     |
| 155                     | Lantung    | Sepukur    | 772.116.000,00     |     |
| 156                     | Lantung    | Ai Mual    | 687.456.000,00     |     |
| 157                     | Lantung    | Padesa     | 717.963.000,00     |     |
| Total Kabupaten Sumbawa |            |            | 123.909.408.000,00 |     |

BUPATI SUMBAWA, 

M. HUSNI DJIBRIL

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA  
TAHAP .....TAHUN ANGGARAN 2018  
PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN SUMBAWA

PAGU ANGGARAN Rp :

| NOMOR | URAIAN                                                                | URAIAN OUTPUT | VOLUME<br>OUTPUT | CARA<br>PENGADAAN | ANGGARAN Rp. | REALISASI Rp. | Sisa<br>Rp. | %<br>CAPAIAN<br>OUTPUT | TEMAGA<br>KERJA | DURASI | UPAH | KET. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------|--------|------|------|
| 1     |                                                                       | 2             | 3                | 4                 | 5            | 6             | 8-6-7       | 9                      | 10              | 11     | 12   | 13   |
| 1     | PENDAPATAN                                                            |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 1.2   | Pendapatan Transfer                                                   |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 1.2.1 | Dana Desa<br>= TAHAP PERTAMA<br>= TAHAP KEDUA                         |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
|       | JUMLAH PENDAPATAN                                                     |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2     | BIAYAJA BANTUAN KB DESA (A)                                           |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.1   | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan                                   |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.1.1 | 1 Kegiatan                                                            |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.1.2 | 2 dst.                                                                |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.2   | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                                   |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.2.1 | 1 Kegiatan                                                            |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.2.2 | 2 dst.                                                                |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.3   | Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                        |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.3.1 | 1 Kegiatan                                                            |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.3.2 | 2 dst.                                                                |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.4   | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                       |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.4.1 | 1 Kegiatan                                                            |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.4.2 | 2 dst.                                                                |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.5   | Bidang Tata Tertib                                                    |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.5.1 | 1 Kegiatan                                                            |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 2.5.2 | 2 dst.                                                                |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 3     | PENBIAYAAN                                                            |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 3.1   | Pengeluaran Pembayaraan                                               |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
| 3.1.2 | Penyertaan Modal Desa<br>- Modal Awal<br>- Pengembangan Usaha<br>dst. |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |
|       | JUMLAH ( Pendapatan - Belanja - Pembiayaan )                          |               |                  |                   |              |               |             |                        |                 |        |      |      |

Disetujui Oleh,  
Desa, tanggal, bulan, tahun  
Kepala Desa .....

Bendahara Desa .....

.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN

| NOMOR | URAIAN                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa                                                                                  |
| 2     | Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa                                                 |
| 3     | Kolom 3 diisi dengan uraian output, misal: Pembangunan Jalan                                                                              |
| 4     | Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output, misal: 500 m                                        |
| 5     | Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan , misal: swakelola                                                                                    |
| 6     | Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran                                                                                                      |
| 7     | Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi                                                                                                     |
| 8     | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi                                                                                |
| 9     | Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut                                                         |
|       | a. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Pengembangan fisik diisi sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto      |
|       | b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:                                                                                               |
|       | - Penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang membuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran 30%;         |
|       | - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%                                            |
|       | - Kegiatan telah terlaksana , sebesar 80%; dan                                                                                            |
| 10    | - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%                                                                                     |
|       | Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa |
| 11    | Kolom 11 diisi dengan Keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana ( kuantitas ).                                               |

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL